



Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia

Prosiding



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia **KONASPI VIII** **2016**

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta | 12-15 Oktober 2016



Universitas Negeri Jakarta | www.seminars.unj.ac.id/konaspi

Prosiding

**Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia
(KONASPI) VIII Tahun 2016**

Editor:

**Agung Premono
I Wayan Sugita
Ragil Sukarno
M. Ali Akbar**

Lay Out:

**Imam F Rahmadi
Khairul Umam
Danar Hari K.**

**Diterbitkan Oleh:
Universitas Negeri Jakarta**

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016

Editor: Agung Premono, I Wayan Sugita, Ragil Sukarno, M. Ali Akbar

ISBN 978-602-60240-0-8



Disclaimer

This book proceeding represents information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Every reasonable effort has been made to give reliable data and information, but the author(s) and the publisher can not assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.

All rights reserved. No part of this publication may be translated, produced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by other any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written consent from the publisher.

Direct all inquiries to State University of Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.

@2016 by State University of Jakarta

KONVENSI NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA (KONASPI) TAHUN 2016

Penanggung Jawab:

Rektor UNJ

: Prof. Dr. Djaali

Panitia Pelaksana

Ketua

: Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA

Sekretaris

: Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

: Dr. Eng. Agung Premono, MT

Reviewer:

Dr. Ucu Cahyana, M.Si.

Dr. Khaerudin, M.Pd.

Dr. Etin Solihatin, M.Pd

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.

Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.

Dr. Muktiningsih, M.Si.

Dr. M. Jafar, M.Si.

Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si.

Dr. Saparuddin, M.Si.

Samadi, M.Si.

Dr. Nurjanah, M.Pd.

Dr. Rini Puspitaningrum, M. Biomed

Sekretariat

Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ

Gedung Rektorat UNJ Lantai 3

Kampus A Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telp : 021-47860238 / Fax. 021-4895130

Email : konaspi@unj.ac.id

Web : <http://seminars.unj.ac.id/konaspi>

Kata Pengantar

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dilaksanakan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) bekerjasama dengan Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri di Indonesia, dan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI). Konaspi VIII bertempat di Jakarta pada tanggal 12-15 oktober 2016 dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah. Konvensi ini merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konvensi diikuti oleh para ahli dan pakar kependidikan dengan mengambil tema “*Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*”.

Buku elektronik prosiding ini adalah kompilasi dari semua paper yang dipresentasikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dengan sub-tema:

1. Standarisasi Kelembagaan LPTK
2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK
3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas
4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK
5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru
6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru
7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen
8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa

PanitiaKonvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para pemakalah yang berkontribusi dalam buku ini dan semua partisan yang menghadiri konvensi ini.

Editor

DAFTAR ISI

BUKU ABSTRAK	i
DISCLAIMER	ii
SUSUNAN PANITIA	iii
SEKRETARIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

PEMBICARA UTAMA

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LPTK Prof. Dr. Djaali	1
STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK MENUJU PENGUATAN PROFESIONALISME GURU Husain Syam	13
PAUD BERKUALITAS: BEBERAPA PERTANYAAN TENTANG STANDAR Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum	18
SISTEM PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS I Nyoman Jampel	28
KOLABORASI STRATEGI PEMBERDAYAAN LINTAS INSTITUSI DAN PARTICIPATORY MANAGEMENT MENUJU SISTEM REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU YANG PROPORSIONAL-EFEKTIF DI INDONESIA Prof. Ganefri, Ph.D	35
REFORMASI SISTEM PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU (TANTANGAN DAN AGENDA INDONESIA DI ABAD ASIA) Prof Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	41

SUB -TEMA I : STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK

A1	PERAN BSNP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GURU MELALUI PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REVITALISASI LPTK Bambang Suryadi	52
A2	KUALITAS LULUSAN LPTK DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008-IWA2:2007 (STUDI KASUS DI FT UNJ) Muhammad Yusro, Sahriani Sachrom dan Erna Septiandini	58

A3	AKREDITASI SMK/MAK SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN Santoso Sri Handoyo, Muhammad Yusro dan Aam Amaningsih Jumhur	63
A4	STUDI HASIL ASESMEN INTERNASIONAL PISA 2012 BIDANG LITERASI SAINS DAN MATEMATIKA Cosmas Poluakan	68
A5	MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MELALUI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN GURU Sani Susanti	78
A6	KONTRIBUSI LPTK UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI ATRIBUT MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERADABAN BANGSA Sudirman	84
A7	INSTITUSI PENDIDIKAN GURU PADA BERBAGAI NEGARA DAN PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) Prof. Rusdi, Ph.D.	90
A8	STUDI KAJIAN PENGREORGANISASIAN KURIKULUM PRODI-PRODI DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNP SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN BAGI UNIVESITAS LPTK LAINNYA Riki Mukhaiyar, Mukhaiyar	97
A9	MODEL AKREDITASI LPTK: SEBUAH USULAN Djuli Djatiprambudi	103
A10	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN GURU (SNPG) Prof. Dr. H. Haris Supratno	108
A11	<i>REWARD DAN PUNISHMENT</i> DALAM PENDIDIKAN Ni Ketut Suarni	118
A12	<i>KEY PERFORMANCE INDICATOR</i> DALAM KONTEKS <i>BALANCED SCORECARD</i> (SATU METODE EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI JARAK JAUH) Rhini Fatmasari	123
A13	TANTANGAN DAN DINAMIKA PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Noor Hudallah	130

SUB-TEMA II: SISTEM REKRUTMEN MAHASISWA LPTK

B1	HUBUNGAN NILAI RAPOR DAN UJIAN NASIONAL DENGAN NILAI BIOLOGI UMUM DAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA CALON GURU MIPA BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Binari Manurung, Mery Tiurma Sinaga dan Tumiur Gultom	137
B2	SISTEM REKRUTMEN, ORIENTASI DAN PENEMPATAN MAHASISWA Daharnis, Zadrian Ardi	144
B3	ANALISIS KEMAMPUAN MATEMATIKA DASAR MAHASISWA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI Armiami	149
B4	PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA CALON GURU BERDASARKAN JALUR MASUK PADA MATAKULIAH KALKULUS LANJUT DI JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP Yerizon	155
B5	SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN DI INDONESIA Soedjatmiko	159
B6	REVITALISASI LPTK MELALUI PERBAIKAN SISTEM REKRUTMEN MAHASISWA Edy Purwanto	164
B7	MEMIKIRKAN KEMBALI SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA CALON GURU DI LPTK Sri Rejeki Urip	168
B8	SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI OLAHRAGA DI PRODI KEOLAHRAHAAN I Wayan Artanayasa	173
B10	UPAYA PENINGKATAN KUALITAS INPUT CALON GURU DI INDONESIA Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.	179

SUB-TEMA III : SISTEM PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS

C3	PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PERAN AKTIF GURU SEBAGAI MODEL PERAN Sapto Adi	183
C4	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN REKRUTMEN DAN PENEMPATAN GURU DI INDONESIA:	191

Ibrahim Gultom

C5	GURU DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI MASA KLONIAL DAN PASCA KEMERDEKAAN Dr. Siti Fatimah, M.Pd.,M.Hum	197
C6	IMPLEMENTASI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL CALON GURU Usmeldi	203
C7	MODEL PEMBELAJARAN SOFT SKILLS MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN Azwar Inra	210
C8	MENCARI FORMULA BARU GURU SENI BUDAYA YANG PROFESIONAL Ramalis Hakim	217
C9	MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM UPAYA PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA PPG SM3T Ngabiyanto	220
C10	PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK CALON GURU MELALUI PENGUATAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN Sugianto, Isnarto, Yuli Utanto	226
C11	OTOTKRITIK PENDIDIKAN PROFESI GURU DI INDONESIA Muslimin Ibrahim	236
C12	PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MV. Roesminingsih	240
C13	SISTEM PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS Rusijono	248
C14	INVESTMENT THE CHARACTER VALUE OF PROFESSIONAL TEACHER CANDIDATE THROUGH THE BOARDING COLLEGE Yoyok Yermiandhoko, Suryanti	254
C15	PENDEKATAN TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN CALON GURU BERASRAMA Ganes Gunansyah	260
C16	PENTINGNYA ASRAMA DALAM PENDIDIKAN CALON GURU: ALTERNATIF PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER PENDIDIK Heny Subandiyah	266

C17	MENYIAPKAN GURU MIPA MELALUI REKONSTRUKSI KURIKULUM MATA KULIAH KEPENDIDIKAN Yuni Sri Rahayu, Tatag YES, Wasis, Rooselyna Ekawati, Dian Novita, Muji Sri P.	274
C18	INTEGRASI PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN DALAM KEPENASIHATAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI Fathur Rahman	281
C19	PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA PGSD BERBASIS PENDIDIKAN BERASRAMA (BOARDING SCHOOL) (STUDI KASUS DI PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016) Mohamad Syarif Sumantri dan Prayuningsih Wardhani	287
C20	MENINGKATKAN KINERJA GURU MELALUI KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI PROFESIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI Restu	293

SUB-TEMA IV: KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK

D2	PENGEMBANGAN APLIKASI E-ASSESSMENT NON-TEST HASIL BELAJAR SEBAGAI KOMPONEN PEMBELAJARAN INOVATIF Khaerudin	298
D3	SISTEM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN GURU BAHASA PRANCIS MENUJU KOMPETENSI GURU MASA DEPAN Ninuk Lustyantie	308
D4	DESAIN PEMBELAJARAN YANG LEADPRENEURIAL: SEBUAH DESAIN PEMBELAJARAN YANG DIPERLUKANOLEH GURU (PENDIDIK) YANG BERMENTAL PEMIMPIN DAN ENTREPRENEURIAL UNTUK MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA 2045 R.A. Hirmana Wargahadibrata	313
D5	STUDI TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Tuti Iriani dan Agung Premono	319
D6	KAJIAN PENDIDIKAN PARTISIPATORIS KOLABORATIF MELALUI KURIKULAB : STUDI KASUS KOMUNITAS SENI RUPA SERRUM Rianto	325

D7	<i>TRANS-DISCIPLINARY BASED CURRICULUM (TDBC) SEBAGAI ALTERNATIF FLEKSIBILITAS DAN PERLUASAN KURIKULUM LPTK MENUJU KOMPETENSI GLOBAL</i> Nurul Ulfatin	331
D8	MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU Ahmad Yusuf Sobri	338
D9	PENGELOLAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI DAN PENDIDIKAN BIOLOGI MENUJU PRODI YANG UNGGUL: LESSON LEARNED Hadi Suwono	342
D10	PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA LPTK UNTUK PENYIAPAN CALON GURU SMK Dr. Yoto, S.T., M.Pd	349
D11	MENDIDIK GURU SMK MENJADI PRAKTISI REFLEKTIF (EDUCATING VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS) Syamsul Hadi	356
D12	MODEL PRAKTIK KEGURUAN BERBASIS <i>LESSON STUDY</i> UNTUK MEMBENTUK KARAKTER CALON GURU TEKNIK PROFESIONAL DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG Machmud Sugandi	364
D13	PENGEMBANGAN WEB BASED LEARNING PADA MATA PELAJARAN SISTEM OPERASI OPEN SOURCE BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Hary Suswanto, Nukleon Jefri Nur Rahman	368
D14	PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK BIDANG PENDIDIKAN KEJURUAN: UPAYA SUKSESI INPRES TENTANG REVITALISASI SMK Dwi Agus Sudjimat	372
D15	PEMBELAJARAN TERINTEGRASI MODEL “SA’T” KAMPUS--SEKOLAH UNTUK MENGEMBANGKAN <i>TEACHING SKILLS</i> , DAN <i>TEACHING EFFICACY</i> MAHASISWA CALON GURU A. Mukhadis	379
D16	PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA BAGI MAHASISWA LPTK Suyono	387
D17	PROFIL PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR MODEL TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	391

Imam Nawawi

D18	MENYIAPKAN CALON GURU DALAM BERLITERASI SAINS MELALUI PEMBELAJARAN BERKONTEKS <i>EXPLISIT NATURE OF SCIENCE (NOS)</i> Sri Rahayu	398
D19	PEMANFAATAN MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN ABAD <i>COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION (CMC)</i> UNTUK XXI Syaad Patmanthara	407
D20	PENYELARASAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN PENYIAPAN GURU SMK PRODUKTIF YANG EFEKTIF MELALUI MAGANG INTENSIF di DU/I Isnandar	413
D21	REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN GURU UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PEMBELAJARAN Nyoman Sudana Degeng	421
D22	KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK DALAM MEMPERSIAPKAN GURU MASA DEPAN Deitje Adolfien Katuuk	426
D23	MENGGAGAS “SEGITIGA EMAS” PRAKTEK PEMBELAJARAN: JALAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN KITA Mister Gidion Maru, Donald M Ratu	434
D24	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PELATIHAN BERBASIS LIFE SKILL PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Julaga Situmorang, Siman	441
D25	MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA SD Naeklan Simbolon, Fitri Pasaribu	452
D26	PROTOTYPE PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMA SESUAI KURIKULUM 2013 UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA Pargaulan Siagian, Erlinawaty Simanjuntak, Katrina Samosir	457
D27	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH PADA MATA KULIAH PENGANTAR EKONOMI MAKRO UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN BERFIKIR KRITIS MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNIMED Thamrin dan Noni Rozaini	471

D28	MODEL PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) UNTUK PENINGKATAN <i>SUBJECT KNOWLEDGE</i> DAN <i>PEDAGOGICAL KNOWLEDGE</i> Erianjoni	480
D29	MODEL PENILAIAN UJI KOMPETENSI GURU SEJARAH SMA BERBASIS <i>HISTORICAL THINKING</i> Ofianto	488
D30	<i>MIND MAP</i> BAGI MASYARAKAT SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA Syafri Anwar	497
D31	PANDANGAN GURU PPKn TENTANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (STUDI KASUS MGMP PKn KOTA PADANG) Dr Isnarmi Moeis	501
D32	POKOK-POKOK PIKIRAN PENYELENGGARAN UJI KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR Marjohan	507
D33	<i>BLENDED LEARNING</i> SYSTEM DI LPTK; MEMPERSIAPKAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Alwen Bentri dan Ulfia Rahmi	515
D34	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UNTUK AKTIVITAS KELAS DAN LABORATORIUM BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI LAJU REAKSI SEBAGAI PENDUKUNG KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN SESUAI TUNTUTAN KURIKULUM 2013 Mawardi Mawardi, Rahadian Zainul, Vika Aumi	522
D35	<i>DEVELOPING SCIENTIFIC APPROACH CHEMISTRY MODULES BASED ON DISCOVERY LEARNING FOR SENIOR HIGH SCHOOL</i> Ellizar, Alina Fauziah, Uswatun Hasanah	528
D36	MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF CIRC BELUM BERHASIL MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA CIBI DI SMPN 1 KOTA PADANG Syamsurizal , Rahmawati Darussyamsu, Doris Yelniwetis	536
D37	<i>MOBILE LEARNING</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU PROFESIONAL Hansi Effendi, Yeka Hendriyani	542
D38	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERKULIAHAN ALJABAR LINEAR ELEMENTER MELALUI PETA KONSEP Hendra Syarifuddin	546

D40	SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA Indina Tarjiah, Retno Wulandari	551
D41	EFEKTIFITAS BLENDED LEARNING DALAM MENINGKATKAN AKSES BELAJAR DI LPTK Z. Mawardi Effendi	555
D43	PERBANDINGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DESAIN GRAFIS BERBASIS MULTIMEDIA (MP-DGBM) DENGAN MODEL KONVENSIONAL DALAM MATAKULIAH DESAIN GRAFIS Asrul Huda, Kasman Rukun	560
D44	<i>THE LEVEL OF METACOGNITION AND THE LEVEL OF LEARNING OUTCOME COMPETENCE ON THE PROGRAM SIMULATION METHOD USING TRAINING KIT ON MICROLONTRLLER MCS51 SYSTEM COURSE IS BETTER ON VARIOUS CREATIVITY.</i> Edidas	567
D45	PENGEMBANGAN <i>SHAKING TABLE</i> SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA KULIAH TEKNIK GEMPA (STUDI KASUS DI JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA) Muhammad Giatman, Rusnardi Rahmad, Nidal Zuwida	572
D46	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MATA PELAJARAN FOTOGRAFI KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA Hendri	580
D47	META ANALISIS EVALUASI PROGRAM PRAKERIN-PLI Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T dan Yuwalitas Gusmareta, M.Pd	585
D49	PENILAIAN KEBERKESANAN PROGAM DIPLOMA TATA BUSANA TERHADAP SIKAP, KEMAHIRAN, PEMIKIRAN BERWIRAUSAHA DAN KEMAMPUAN MENGENAL PELUANG USAHA MAHASISWA Ernawati	591
D50	MEMILAH CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN SARJANA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU Edy Cahyono	597
D51	PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MIPA DI DAERAH 3T Zaenuri	602
D52	PENGUATAN <i>SOFT SKILL</i> LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN VOKASI I Made Sudana	608

D53	<i>IMPLEMENTASI CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING</i> BERBASIS PEMBELAJARAN <i>GENRE</i> Nur Qudus, Virgiawan Adi Kristianto	615
D54	AREVITALISASI MATA KULIAH KEILMUAN DALAM KURIKULUM LPTK DI INDONESIA Prof. Dr. Rustono, M.Hum.	622
D55	MEMBANGUN BUDAYA LITERASI MELALUI (BER)KARYA SASTRA: STRATEGI PEMBELAJARAN BAGI (CALON) PENDIDIK BAHASA DAN SASTRA Agus Nuryatin	627
D56	KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN SIDOARJO Raharjo	631
D57	PENDIDIKAN IPS BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DI ERA GLOBAL Rindawati	634
D58	KEBIJAKAN MODEL OPEN EDUCATIONAL RESOURCES SEBAGAI LINK AND MATCH DALAM MASYARAKAT DIGITAL DENGAN POTENSIAL SHARING ECONOMY Harti	642
D59	OPTIMALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI ANALISIS PERSPEKTIF PERBANDINGAN KONTEN KURIKULUM 2013 SEBELUM DAN SESUDAH REVISI PADA TINGKAT SMA Ady Soejoto	649
D60	HUBUNGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN CAPAIAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASISWA Siti Masitoh	658
D61	PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD Siti M. Amin	666
D62	KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK UNTUK MENYIAPKAN GURU SMK DI ERA TEKNOLOGI REFLEKSI PEMIKIRAN Soeryanto	672
D63	UPAYA PENYIAPAN MAHASISWA CALON GURU IPA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SLB Sri Poedjiastoeti	679
D64	IMPLEMENTASI <i>TEACHING FACTORY</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYIAPAN CALON GURU SMK	685

Supari Muslim

D65	SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENYIAPAN GURU PROFESIONAL MELALUI JALUR PPG Suryanti	692
D66	REKONSTRUKSI MATA KULIAH ETIKA PROFESI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERKAIT TINDAK PIDANA BAGI CALON GURU Vicky Dwi Wicaksono	697
D67	PENGUATAN PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (HARAPAN, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKANYA Dra. Sri Sulistiani, M.Pd	703
D68	MENGEMBANGKAN KURIKULUM KETERAMPILAN ABAD XXI I Wayan Redhana	712
D69	ANALISIS TERHADAP SAJIAN NILAI-NILAI SIKAP DAN LITERASI DINI PADA BUKU PELAJARAN SD: REFLEKSI UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 A. A. I. N. Marhaeni; Nyoman Dantes; Kadek Sonia Piscayanti	719
D70	<i>REFLECTIVE TEACHING: PERSEPSI MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU MELALUI PRE-SERVICE TEACHER TRAINING</i> Ni Made Ratminingsih, Putu Kerti Nitiasih	723
D71	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SAINTIFIK DENGAN PENALARAN DASAR INDUKTIF DAN DEDUKTIF Ida Bagus Nyoman Sudria	731
D72	HEUTAGOGY: SOLUSI PEMBELAJARAN LPTK DI ERA MILINIUM BARU Made Agus Dharmadi	741
D73	PEMBANGUNAN OLAHRAGA PENDIDIKAN YANG BERKEMAJUAN Amung Ma'mun	747
D74	ANTARA DUNIA PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA: DUA DUNIA YANG BERBEDA Oong Komar	761
D76	PENGOKOHAN PERAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR DALAM MENGHASILKAN GURU SMK GAMBAR BANGUNAN DAN FASILITATOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT Johar Maknun	766

D77	REVITALISASI PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MELALUI KEGIATAN CONFERENCE ANTARA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL), GURU PAMONG (GP) DAN PRAKTIKAN UNTUK MEMBANGUN CALON GURU PROFESIONAL Andi Asmawati Azis, Muharam, Nenslianti, La Sunra	771
D78	PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 Suryanef dan Al Rafni	775
D79	PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR HARMONI MAHASISWA (Sebuah Penelitian Eksperimen di Jurusan Seni Musik UNJ) Caecilia Hardiarini	781
D80	PENGARUH MEDIA BUKU HARIAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NARASI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR (Studi Eksperimen di SDN Kelurahan Baru Jakarta Timur) Fahrurrozi dan Euis Latifah	789
D81	THE DIFFERENCE OF LEARNING OUTCOMES ON INTRODUCTION TO ACCOUNTING AND FINANCE BETWEEN COOPERATIVE LEARNING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) WITH JIGSAW AT STUDENT TENTH GRADE ACCOUNTING CLASS AT 40 JAKARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL Dwi Rinanti, Dra. Sri Zulaihati, M. Si , Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak	796
D82	REVITALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI DI SMA BERBASIS KONSTRUKTIVISME Suparno	816
D83	LINGKUNGAN KAMPUS, POLA ASUH DAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH Santi Susanti, M.Ak. , Dra. Sri Zulaihati, M.Si.	824
D84	OPTIMALISASI PERKEMBANGAN LITERASI EMOSI SEBAGAI KONDISI ADAPTIF INDIVIDU Karsih	840
D85	ANALISIS KURIKULUM SMK 2013 TERHADAP RELEVANSI KOMPETENSI DASAR SMK PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI KERJA TEKNISI SEPEDA MOTOR C. Rudy Prihantoro, Puji Iswanto	848
D86	BEBERAPA CATATAN PROGRAM PPG KOLABORATIF DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Ivan Hanafi	857

D87	PERAN PENDIDIKAN GURU DALAM MENINGKATKAN BANGSA YANG BERKUALITAS Poncojari Wahyono	862
D91	ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMP N 29 PADANG Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela	869
D94	GURU BAHASA DI ERA MILENIUM:DARI TRADISIONAL KE TRANSFORMASIONAL Subyantoro, Fandi Kusuma	875
D95	HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SIKAP MAHASISWA DALAM PROGRAM KONSERVASI UNNES (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Geografi Fis Unnes Tahun 2012) Apik Budi Santoso dan Eko Ahmad Riyanto	880
D96	YADNYA SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN PPKn DI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Sukadi	886
D97	EVALUASI KEMAMPUAN CALON GURU DALAM PENYUSUNAN INSTRUMEN (TES) SEBAGAI ALAT UKUR PENCAPAIAN KOMPETENSI SISWA Zulkifli Matondang	895
D99	PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE EXPLAIN PADA MATERI SUHU DAN KALOR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DAN MEMINIMALKAN MISKONSEPSI Mursalin	905
D100	INSTRUMEN TES KETERAMPILAN OLAAHRAGA BAGI CALON MAHASISWA BARU FIK UM M.E. Winarno	910
D101	PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK BERBASIS KEMITRAAN Abdullah sinring	918
D102	RELEVANSI KURIKULUM LPTK DENGAN PENGGUNA LULUSAN Arnidah	925
D103	INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN e-KAMUS BERBASIS VISUAL STUDIO DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MAKANAN ORIENTAL (Menggunakan Analisis Statistik Pre & Post Test) Nur Riska, Mahdiyah	934

D105	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS E-LEARNING PADA MATAKULIAH DISAIN INSTRUKSIONAL Sahat Siagian, Pardomuan Naulli Josip Mario Sinambela, Yasaratodo Wau	939
------	--	-----

SUB-TEMA V: STANDAR MUTU DAN PROFESIONALISMA GURU

E1	PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Marselus Ruben Payong	949
E2	PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELAKSANAAN PTK Jamiluddin, Mursidin T., Damhuri, Mustamin Anggo, Mohamad Salam	957
E4	PENGEMBANGAN KAPASITAS MENGAJAR GURU MELALUI PROGRAM <i>PRE-SERVICE EDUCATION</i> (FAKTA, DAN SOLUSI) Maryam Rahim	963
E5	MENCERMATI KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU Wenny Hulukati	971
E6	MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MASALAH Evi Hulukati, Novianita Achmad, Siti Zakiyah	977
E7	KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DILIHAT DARI KINERJA SUPERVISOR DI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA Nina Lamatenggo	985
E9	PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN REFLEKTIF BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) DALAM MATAKULIAH KONSEP DASAR FISIKA DI PGSD FIP UNJ Yetti Supriyati	991
E10	BERBAGAI BENTUK MODIFIKASI PENERAPAN <i>LESSON STUDY</i> UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DAN KUALITAS PEMBELAJARAN SAINS SERTA PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Ibrohim	995
E11	EKSISTENSI PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PROFESIONALITASNYA)	1004

	Muslihati	
E13	DILEMA GURU PENDIDIKAN KHUSUS YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF DI SEKOLAH INKLUSIF Mohammad Efendi	1009
E14	PERAN BERBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL Maisyaroh	1014
E15	ANALISIS PENILAIAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN Widiyanti	1017
E16	MENINGKATAKAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI PENDEKATAN MULTI SINERGI Agus Hery Supadmi Irianti	1023
E17	PENINGKATAN KEPROFESIONALAN GURU UNTUK MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN Tri Atmadji Sutikno	1030
E18	EMPAT STRATEGI TERPADU UNTUK MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN BUDAYA KREATIF GURU DAN SEKOLAH DALAM MENYIAPKAN GENERASI MASA DEPAN YANG CERDAS Siusana Kweldju	1038
E19	REVITALISASI DAN OPTIMALISASI KERJASAMA SEKOLAH, INDUSTRI DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU VOKASI BERKELANJUTAN Ahmad Dardiri, Suparji, Isnandar, Hary Suswanto	1044
E20	KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA. Hakkun Elmunsyah	1051
E21	PENGARUH MANAJEMEN PEMBELAJARAN DAN KOMITMEN MENJALANKAN TUGAS TERHADAP KINERJA GURU DI KOTA TOMOHON Roos Marie Stella Tuerah	1058
E22	PROFESIONALITAS GURU SMK: TANTANGAN DAN PELUANG Herry Sumual, Grace J Sopotan	1065
E23	PROFIL KEPERIBADIAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU SM3T BERASRAMA ANGKATAN KE IV TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Zuraida Lubis, Wildansyah Lubis, dan Sri Milfayetty	1071

E26	PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN SEKOLAH MELALUI PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) Isda Pramuniati, Ridwan Abdullah Sani, Evi Eviyanti	1078
E27	PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BERBASIS BUDAYA DAERAH SUMATERA UTARA Efendi Napitupulu, Mursid, Hamonangan Tambunan	1085
E28	PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA MODEL ACTIVITY CENTERED TUTORIAL DAN EXPLORATORY TUTORIAL TERHADAP HASIL BELAJAR BIDANG ELEKTRONIKA INDUSTRI Sriadhi	1095
E29	STANDART MUTU DAN PROFESIALISME GURU Prof. Dr. Rosmawaty, M.Pd	1103
E30	KEBIJAKAN PENATAAN DAN STANDARISASI GURU PENDIDIKAN KESETARAAN Yusnadi	1109
E31	PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING FIP UNIMED Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd	1113
E32	PENGUATAN PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI TEORI MOTIVASI HERZBERG Rosdiana	1120
E34	ANALISIS DASAR, APLIKASI DAN PERMASALAHAN PENGAWAS BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Mirza Irawan	1126
E35	PROFESI PENDIDIK : TANTANGAN DAN HARAPAN Nasrun, Nani Barorah Nst.	1132
E36	PENINGKATAN STANDAR MUTU SEKOLAH MELALUI OPTIMALISASI TENAGA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Abna Hidayati, Eldarni	1137
E39	ARAH PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER KEBANGSAAN Azwar Ananda	1140
E40	KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA PADANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Gusril, Edwar	1149

E41	EFEKTIVITAS <i>STORYTELLING</i> DENGAN WAYANG DARI DAUN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA PARIAMAN Rakimahwati, Melisa Azni	1156
E42	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENGEMBANGAN <i>SELF-EFFICACY</i> GURU Nurhizrah Gistituati	1161
E43	PENGEMBANGAN ALAT PEMAHAMAN DIRI SISWA SLTA Syahniar, Taufik	1169
E44	PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA: KAJIAN DAN PRAKTIS DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG Alizamar	1172
E45	CERTIFIED SCIENCE TEACHER'S PROBLEMATICS IN WEST SUMATERA AND ITS SURROUNDING Lufri	1178
E46	IMPLEMENTASI MODEL BIMBINGAN KARIR UNTUK ANAK HAMBATAN PENDENGARAN SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KE DUNIA KERJA Mega Iswari	1184
E48	USING ANDROID APPLICATION FOR CHEMICAL LEARNING MEDIA BASED CHEMISTRY TRIANGLE Hardeli, Yerimadesi, Anggi Y, Santi AS, Widya GS, Karlina AB	1188
E49	PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS X SMAN KOTA PADANG Irwan, Sri Elniati	1196
E50	PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS MODEL <i>DISCOVERY LEARNING</i> DAN ALAT PRAKTIKUM GERAK MELINGKAR BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL Yulkifli, Yohandri, Novita Virmani	1203
E51	ORGANIZATIONAL CULTURE ON PRIVATE VOCATIONAL EDUCATION OF MANAGEMENT BUSINESS GROUP IN PADANG Hanif Al kadri	1208
E52	STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENCAPAI PROFESIONALISME GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Bambang Budi Wiyono	1213
E53	GURU ASEAN PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yunia Wardi, Tri Kurniawati	1220

E54	KINERJA GURU BAHASA INGGRIS SMA PASCA SERTIFIKASI GURU M. Zaim	1225
E55	MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU BERKELANJUTAN Susi Evanita	1232
E56	MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU Dedy Irfan	1240
E57	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU SMK BERBASIS KOMPETENSI (<i>COMPETENCY-BASED TRAINING</i>), PADANG Ramli	1245
E58	UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, PRAKTIKALITAS DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) <i>ONLINE</i> Suartin, Sukardi	1253
E59	PRAKTIKALITAS PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUKSI DI PENDIDIKAN TINGGI Ganefri, dan Hendra Hidayat	1260
E60	KINERJA GURU PASCA REORIENTASI NILAI UJIAN NASIONAL Rasdi	1266
E61	PENGUNAAN METODE <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> DALAM PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA Saru Arifin, SH., LL.M	1275
E62	PERSPEKTIF KINERJA PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI INDONESIA Mugiyo Hartono	1284
E63	Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan bagi Lulusan Program Pendidikan Guru Terintegrasi (PPGT) Berkewenangan Tambahan sebagai Guru Matematika melalui MGMP Dr. Isti Hidayah, M.Pd	1291
E64	MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS ETNOSAINS [MPIBE] UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI SAINS DAN NILAI KONSERVASI KEARIFAN LOKAL PADA SISWA DI INDONESIA Sudarmin	1298
E65	MODEL BERMAIN BERMUATAN SAINS BERNILAI KONSERVASI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA TAMAN KANAK-KANAK Dwi Yulianti, Sri S. Dewanti H	1307

E66	MODEL PENINGKATAN KUALITAS GURU OTOMOTIF MENJADI ASESOR UJI KOMPETENSI PROFESIONAL Abdurrahman	1312
E67	GURU PROFESIONAL, TANTANGAN PENDIDIKAN, DAN DAYA SAING BANGSA Eko Handoyo	1326
E68	PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU KEJURUAN DALAM PERSPEKTIF KONTEKS, KONTEN, DAN PROSES Heri Yudiono	1332
E69	STANDARISASI MATA KULIAH KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI SEJENIS PADA LPTK Arif Purnomo	1336
E70	PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU MATEMATIKA DI INDONESIA Agung Lukito	1341
E71	PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBIASAAN KEHIDUPAN BERKARAKTER DI SEKOLAH MODEL CPR- 2DF (ALTERNATIF MENYIAPAKAN GENERASI EMAS BERKARAKTER) Budi Purwoko	1346
E72	TUBUH YANG MENDIDIK: KESEHATAN HOLISTIK DALAM PENDIDIKAN GURU Made Pramono	1353
E74	KAJIAN TEORITIK MODEL PEMBELAJARAN METADIRI DALAM MEMBANGUN KETERAMPILAN METAKOGNITIF MAHASISWA CALON GURU Utija Azizah	1358
E75	IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION WITH APPLYING MAPPING, DISTRIBUTION AND PROCUREMENT OF TEACHERS SYSTEMS IN INDONESIA Erny Roesminingsih	1363
E76	REORIENTASI KE PEMBELAJARAN PRODUKTIF SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU I Gusti Made Sanjaya	1371
E77	SINERGI PELATIHAN GURU DENGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN MELALUI PUSAT STUDI DI SETIAP PROGRAM STUDI DI LPTK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Luqman Hakim, Albrian Fiky Prakoso	1375
E78	SEBUAH PEMIKIRAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI ERA DIGITAL Mochamad Cholik	1381

E79	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF MELALUI PEMBELAJARAN Mustaji	1387
E80	MODEL PERKULIAHAN INOVATIF UNTUK CALON GURU HEBAT Suyatno	1393
E81	AKTIVITAS EKSPLORASI FAKTA DAN KONSEP ANATOMI TUMBUHAN UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR PENYELESAIAN MASALAH Rinie Pratiwi Puspitawati	1402
E82	MENUMBUHKAN POTENSI JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA MELALUI KULIAH KEWIRAUSAHAAN DI JURUSAN PKK FT UNESA Rita Ismawati	1410
E83	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENDIDIKA DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU Riza Yonisa Kurniawan	1415
E84	CONSTRUCTING TEACHER PROFESSIONALISM: BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE TEACHING PROFESSION Siti Ina Savira	1421
E85	PERAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN GURU PJOK PROFESIONAL YANG PEMBELAJAR Suroto	1425
E86	PREPARASI GURU YANG KOMPREHENSIF Suyono	1431
E87	PROFESIONALISME GURU DAN TUNTUTAN MUTU PEMBELAJARAN ABAD 21 Wiwik Sri Utami	1440
E88	PENINGKATAN PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN KHUSUS BERDASARKAN EVALUASI KINERJA DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH KHUSUS Mumpuniarti	1446
E89	MENCETAK GURU BAHASA INGGRIS 'POSTMETODIST' MELALUI SIMULASI <i>MICROTEACHING</i> KOLABORATIF Luh Putu Artini, Ni Nyoman Padmadewi	1451
E90	MEREVITALISASI BERMAIN PERAN MAKRO DALAM MENUMBUHKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA PADA ANAK Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd.	1458
E91	CHARACTER EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM	1461

Desak Putu Parmiti

E92	GURU SAINS PROFESIONAL DAN BERKARAKTER INDONESIA I Wayan Suastra	1469
E93	MENGGAGAS GURU MASA DEPAN: MEREKONSTRUKSI PERAN LPTK DALAM PERSAINGAN GLOBAL I Nyoman Jampel	1476
E95	PENINGKATAN MUTU GURU MELALUI MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BIDANG STUDI (SUBJECT SPESIFIC PEDAGOGY) BERDASARKAN CROSS-FERTILIZATION (SERBUK SILANG) PADA KEAHLIAN TEKNIK MESIN Wahid Munawar	1482
E96	TRANSFORMING EDUCATION SYSTEM BY IMPROVING TEACHER PROFESSIONALISM Ranbir Singh Malik.	1488
E97	PELUANG DAN TANTANGAN FKIP PENGHASIL CALON GURU PROFESIONAL Dr. Martono	1502
E98	PENINGKATAN KOMITMEN PROFESI GURU SMP MELALUI PENGEMBANGAN SELF LEARNING DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR.1 Miftachul Hidayah	1506
E99	PENERAPAN PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Apeles Lexi Lonto	1515
E100	PENILAIAN KINERJA GURU SENI BUDAYA SEBAGAI ALAT UKUR KOMPETENSI PROFESIONALISME Dinny Devi Triana	1521
E101	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR DI PERGURUAN TINGGI Dede Rahmat Hidayat, Arga Satrio Prabowo	1528
E102	PENGARUH KUALIFIKASI GURU DAN STATUS SOSIAL EKONOMI SISWA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI INDONESIA TAHUN 2012-2015 Siti Nurjanah, Rayhans Malik	1535
E103	PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN <i>ACTIVE LEARNING</i> Susan Febriantina	1545

E104	PENINGKATAN MUTU AKADEMIK MELALUI PENDEKATAN MUTU TERPADU (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI) Rina Febriana	1550
E106	DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI GURU DI KALIMANTAN TIMUR Lambang Subagiyo dan Irwan Gani	1557
E107	STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING PENGARUHNYA TERHADAP TINGKATAN HASIL BELAJAR WELL STRUCTURED DAN MODERATELY STRUCTURED BIDANG MEKANIKA TEKNIK Tri Kuncoro	1563
E108	PROFESIONALITAS GURU MATA PELAJARAN EKONOMI AKUNTANSI SMA SE MALANG RAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Cipto Wardoyo dan Sunaryanto	1570

SUB-TEMA VI: SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU

F1	KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN GURU DI WILAYAH 3T (NIAS SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH DALAM RANAH WILAYAH 3T) Martiman Su'aizisiwa Sarumaha	1580
F2	DILEMATENAGA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DERAH (STUDI KASUS PROVINSI MALUKU) Dr. Abdul Haris Fatgehipon Msi	1591
F3	PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU PNS DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Amos Neolaka	1598
F4	STRATEGI MANAJERIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERKUALITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PEDALAMAN Achmad Supriyanto	1606
F5	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Purnomo	1612
F6	REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK Ernawati	1618

F7	PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL: STUDI KASUS DI KECAMATAN KABARUAN, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Revolson Alexius Mege, Alfonds Andrew Maramis	1624
F8	STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK Muhammad Yahya	1630
F9	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd	1637
F10	GURU DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo) Yulianto Kadji	1646
F11	PENELUSURAN KEPUASAN <i>STAKEHOLDERS</i> TERHADAP LULUSAN D3 TATA BOGA UNJ DI BERBAGAI LAPANGAN PEKERJAAN Mahdiyah, Cucu Cahyana, Sara Sabrina	1651

SUB-TEMA VII: STANDARISASI PENDIDIKAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

G1	PENDIDIKAN WIRAUUSAHA DAN KEUANGAN SEJAK USIA DINI DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI INDONESIA Rini Setiawati	1655
G2	PAMONG BELAJAR NOMENKLATUR UNTUK PENDIDIK NONFORMAL Ach. Rasyad	1662
G3	STANDARISASI DAN PERANAN PENGAWAS PAUD DI KABUPATEN GORONTALO Dr. Misran Rahman	1665
G4	MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PAUD “MENDIDIK DENGAN HATI” Fory Amin Naway	1670
G5	MEMBERI RUANG BAGI KESETARAAN GENDER: PEMAKNAAN IDENTITAS GENDER BAGI GURU PAUD LAKI-LAKI Ali Imron dan Ika Ayu Ningrum	1678
G6	EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK ANAK USIA DINI Elindra Yetti	1685
G7	REVITALISASI PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU Djoko Saryono Dan Waras Khamdi	1690

G8	KEBERADAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI ORGANISASI NON PROFIT Ahmad Samawi	1697
G10	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN MELALUI PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA TERPENCIL Aman Simaremare	1701
G11	MENINGKATKAN KREATIFITAS ANAK MELALUI BERMAIN Damaiwaty Ray	1707
G12	MEMBANGUN GENERASI YANG BERKARAKTER MELALUI GURU PAUD YANG KREATIF Kamtini	1711
G13	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI INDONESIA: PERAN LEMBAGA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEMENUHI STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN DAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd	1717
G15	PENGUATAN PENGAJARAN GURU SAINS LEVEL DASAR DENGAN STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS LITERASI SAINS Yanti Fitria	1723
G16	GRAND DESIGN LITERASI MEMBACA SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBENTUKAN KARAKTER PEKA SOSIAL DAN BUDAYA DI SD Taufina	1730
G17	THE INFLUENCE OF PERSONALITY CARRER TENDENCY AGAINTS INTERPRENEURSHIP CAREER INTEREST OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN WEST SUMATERA Asmar Yulastri	1738
G18	REVITALISASI KOMITMEN GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PASCA SERTIFIKASI Ahyanuardi	1762
G19	<i>TEACHING FACTORY</i> SEBAGAI WAHANA PENERAPAN WORK BASED LEARNING BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA SINKRONISASI KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI Rijal Abdullah	1770
G20	PENGEMBANGAN ALUR BELAJAR TOPIK PERBANDINGAN DENGAN PENDEKATAN RME	1778

Ahmad Fauzan, Elva Yezita

G22	STANDAR PAUD: MENUJU LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERKUALITAS DI INDONESIA Edi Waluyo, Diana	1786
G23	STRATEGI PENDIDIKAN DI USIA EMAS DENGAN SUMBER BELAJAR “ <i>BY UTILIZATION</i> ” LINGKUNGAN ALAM DALAM MENYIAPKAN GENERASI EMAS 2045 Dr. Andi Mariono, M. Pd	1793
G24	MENGGUGAT PENCAPAIAN KOMPETENSI, SEBAGAI TARGET PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI Bachtiar Sjaiful Bachri	1801
G25	MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI DAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI Dr. Rachma Hasibuan, M.Kes	1810
G26	IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Gunarti Dwi Lestari	1819
G27	PENTAS FESTIVAL WAYANG BOCAH SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI BUDAYA MENUJU GURU ANAK USIA DINI YANG MULTIPROFESIONALDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Joko Pamungkas	1823
G29	THEMATIC ENGLISH LEARNING MATERIAL TO ENCOURAGE GLOBAL CITIZENSHIP AMONG INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Hanip Pujianti	1835
G30	ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMPN 29 PADANG Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela	1842
G31	STIMULASI PERKEMBANGAN BERBAHASA ANAK USIA DINI Yulsyofriend	1848
G32	PROFESIONALISME PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Ummysalam A.T.A Duludu	1852
G33	INTEGRATING RENEWABLE ENERGY EDUCATION IN JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOLS’ CURRICULUM IN INDONESIA Ratna Dewi Kusumaningtyas	1856
G37	CALON GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI TOMBAK KEBERHASILAN BANGSA Prof. Dr. Yalvema miaz, M.A	1863

SUB-TEMA VIII: PENDIDIKAN GURU DAN PERADABAN BANGSA

H1	ANALYSIS A MODEL OF THE DEVELOPMENT SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL TEACHER IN INDONESIA RURAL AREAS BY SEKOLAH GURU INDONESIA PROGRAM (SGI) Cici Kurniasih, Yosa Novia Dewi, Elis Trisnawati, Yulya Srinovita	1868
H2	PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PERADABAN BANGSA Moh. Rizki Djibran, Mardia Bin Smith	1877
H3	GURU DAN TANTANGAN PERADABAN BANGSA MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Novianty Djafri	1882
H4	PENDIDIKAN GURU DALAM KONTEKS KESANTUNAN BERBAHASA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA: PILAR PENOPANG PERADABAN Prof.Dr. Hasanuddin, M.Hum	1889
H6	PERAN GURU DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PERADABAN BANGSA DENGAN MEWARISI NILAI –NILAI Nadiroh	1894
H7	PEMBANGUNAN SMK BERBASIS INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INPRES NO.9 TAHUN 2016 DAN NAWACITA PRESIDEN RI Dr. Riyan Arthur, M.Pd	1903
H8	KEBIJAKAN PEMBINAAN PROFESIONAL GURU DI DAERAH TERTINGGAL Rusdinal	1910
H9	PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER Sulthoni	1915
H10	MENJADI DESAINER PEMBELAJARAN SEJATI Hardika	1920
H11	SISTEM PENDIDIKAN GURU YANG BERLANDASKAN PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA Dedi Kuswandi	1928
H12	GURU DAN PERADABAN BANGSA Hariyono	1934
H14	PERAN GURU MENGHADAPI TUNTUTAN MORALITAS DI ABAD 21 Paulus Robert Tuerah	1939

H16	STRATEGI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADAPAN BANGSA YANG BERMORAL DAN BEKARAKTER Laurensia Masri Perangin angin	1948
H18	<i>RETHINKING EDUCATION: ANOMALI PERADABAN DALAM PENDIDIKAN GURU KITA.</i> Mestika Zed	1956
H19	MEMBANTU GURU MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU BANGSA YANG BERADAB MELALUI PERBAIKAN IKLIM KELAS Dr. Hadiyanto, M.Ed.	1965
H20	PENDIDIKAN GURU BERBASIS BUDAYA BANGSA Mudjiran	1972
H21	REVITALISASI NILAI-NILAI EDUKATIF LAGU-LAGU MINANG UNTUK MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK Desyandri	1977
H22	PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBANGUNAN PERADAPAN BANGSA (ANALISIS PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER OLEH GURU PADA SEKOLAH DASAR PESISIR PANTAI KOTA PADANG) Junaidi Indrawadi	1988
H23	MENYIAPKAN SOSOK PENDIDIK UNTUK GENERASI INDONESIA EMAS 2045 Yasnur Asri	1994
H24	MENYIAPKAN GURU INDONESIA UNTUK ASEAN Hendi Pratama, S.Pd., MA.	2001
H25	MODEL PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BERBASIS KONSERVASI PADA ARAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (Perspektif Kreativitas Dosen Mewujudkan Kurikulum Hukum Membangun Peradaban Bangsa Berkarakter Pancasila) Rodiyah	2004
H26	Quo Vadis Pendidikan Hukum Kita Ali Masyhar Mursyid	2017
H27	PENDIDIKAN GURU DAN PERADAPAN BANGSA Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.	2023
H28	REVITALISASI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) SEBAGAI UPAYA MENINGKTKAKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME GURU Dr. Martitah, M.Hum	230

H29	MEMAKNAI ULANG RELASI GURU DAN MURID DALAM PEMBELAJARAN DI TENGAH ARUS PEMAJUAN HAK AZASI MANUSIA DAN PERADABAN BANGSA Suhadi	
H30	PEMETAAN PENDIDIKAN KARAKTER DIINTEGRASIKAN PADA KURIKULUM MATEMATIKA SEKOLAH BERBASIS PROYEK SECARA BERJENJANG DENGAN SISTSEM SPIRAL Sukestiyarno, Budi Waluyo	2042
H31	REVOLUSI MENTAL: PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA Hardi Suyitno	2050
H32	PROYEKSI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI BASIS PEMBARUAN PENDIDIKAN DAN MORAL BANGSA Indah S. Utari Sujianto	2057
H33	RE-DEFINISI FILOSOFIS GURU “DIGUGULANDITIRU” DALAM ERA PENDIDIKAN MODERN Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si.	2062
H34	KEADABAN GURU DAN GURU KEADABAN: AKSENTUASI REVITALISASI PENDIDIKAN GURU Budinuryanta Yohanes	2068
H35	PERBAIKAN KUALITAS GURU DI INDONESIA DARI HULU KE HILIR Harmanto	2074
H36	FORMAT PENDIDIKAN GURU IDEAL A LA STKIP AL HIKMAH SURABAYA: SEBUAH STUDI KASUS Lies Amin Lestari	2079
H37	MEMBANGUN KEINDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN (GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM SM-3T DI SUMBA TIMUR) Luthfiyah Nurlaela	2086
H38	STANDARISASI PENINGKATAN LIFE SKILLS MELALUI KEGIATAN OLAHRAGA DI SEKOLAH DASAR: MUNGKINKAH? Miftakhul Jannah	2094
H39	URGENSI NILAI-NILAI SYARIAH BAGI PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA Moch. Khoirul Anwar	2099
H40	IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GURU	2105

Mochamad Nursalim

H41	MENAKAR PENTINGNYA SEBUAH PUSAT LITERASI DI LPTK Pratiwi Retnaningdyah	2113
H43	PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERKULIAHAN NON-PANCASILA (PERKULIAHAN BIDANG IPA): PERSEPSI DOSEN Wahono Widodo; Nanik Setyowati; Martini; Dhita Ayu Permata Sari	2120
H44	PROGRAM PELATIHAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA Tri Wrahatnolo	2127
H45	PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA (PENJASOR) Toho Cholik Mutohir, Made Sriundy Mahardika	2134
H46	<i>PARTNERSHIP</i> GURU DAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU Luh Putu Putrini Mahadewi, Adrianus I Wayan Iliia Yuda Sukmana, Alexander Hamonangan Simamora	2144
H47	GURU: DIGUGU DAN DITIRU Ida Bagus Putrayasa	2150
H48	PENDIDIKAN BUDAYA BERKOTA UNTUK PENGUATAN MODAL SOSIAL WARGA M. Syaom Barliana	2156
H49	PEDAGOGIK SPIRITUAL: Telaah ihwal Landasan Nilai dan Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Guru Berprestasi Syihabuddin	2164
H51	PERAN PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GURU DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL Rhini Fatmasari, Untung Laksana Budi, Ade Mardiana dan Zuwirna	2172
H52	PENDIDIKAN LITERASI ABAD 21 Endry Boeriswati	2179
H54	PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER Sulthoni	2192

H55	INTEGRITAS SEKOLAH BERKONTRIBUSI MEMBENTUK PESERTA DIDIK BERKARAKTER Arwildayanto	2197
H56	GURU PROFESIONAL DI TENGAH POLEMIK PENDIDIKAN DI INDONESIA Prof. Dr. Agus Irianto	2206
H57	OER DALAM PENDIDIKAN GURU PADA SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH Durri Andriani	2215
H58	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN Nurhikmah H, Arnidah	2224

REFORMASI SISTEM PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU

(Tantangan dan Agenda Indonesia di Abad Asia)

Prof Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Gorontalo

PENDAHULUAN

Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara kegiatan KONASPI VIII tahun 2016 di Jakarta karena memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan arah kebijakan pendidikan guru di Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini diharapkan menjadi “*energizer*” dalam mengurai berbagai persoalan pengangkatan dan pendistribusian guru secara nasional.

Tema ini tentunya terkait dengan tema besar yang dibahas dalam forum Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia (ALPTKNI) yang memandang kegiatan KONASPI VIII ini sebagai forum yang tepat untuk memperkokoh kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Pendidikan Guru. Hal ini menjadi jawaban dari kebutuhan dan tantangan besar yang sedang kita hadapi, ketika bangsa Indonesia sudah menyatakan diri siap memasuki era persaingan di Asia Tenggara dan di dunia.

Kami meyakini bahwa sebuah lompatan kebijakan di negeri ini sangat kita butuhkan. Kita butuh menciptakan momentum mendasar untuk berubah. Langkah ini harus kita ambil agar Indonesia lebih akseleratif dan tidak lagi berkutat dalam masalah klasik terkait dengan pengangkatan dan distribusi guru.

KONDISI OBJEKTIF TATA KELOLA GURU DI INDONESIA

Sejauh ini, tudingan yang muncul dari berbagai pihak tidak terlepas dari beberapa kondisi objektif yang terjadi dalam tata kelola guru di Indonesia, antara lain: (1) minimnya pengangkatan guru baru, dengan alasan rasio guru dan siswa sudah cukup; (2) birokrasi pendistribusian guru berada di daerah, akibatnya kelebihan dan kekurangan guru sulit

terdeteksi dan dieksekusi; (c) sistem informasi data guru belum memadai; (d) promosi guru cenderung tertutup, akibatnya guru yang berprestasi tinggi cenderung digunakan untuk menduduki jabatan di pemerintahan; (e) belum adanya komitmen yang kuat tentang pengangkatan guru honor, sehingga menimbulkan keresahan; (f) isu distribusi guru belum mendapat perhatian yang serius dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena banyak pihak masih cenderung menjadi guru di wilayah perkotaan ketimbang di daerah terluar, terdepan dan terpencil. Untuk mencermati akar masalahnya, perlu ditelusuri rasio guru dengan siswa dan sekolah.

Rasio Guru dengan Siswa dan Sekolah

Untuk merespon kondisi objektif yang ada, diperlukan data yang cukup guna menentukan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan, agar lebih terukur seiring munculnya isu-isu yang tidak produktif yang bisa menjadi “predator” bagi lembaga pendidikan.

Adapun upaya “sederhana” yang bisa dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi adalah melakukan kajian mendalam berkenaan dengan rasio guru dengan siswa serta sekolah. Simulasi data melalui hasil kajian mendalam adalah prasyarat utama sebelum dilakukan reformasi tata kelola guru dimulai dari redistribusi guru sampai kebijakan rekrutmen guru baru. Redistribusi guru bertujuan menjawab kekhawatiran sebagian pihak melihat pendistribusian guru yang belum merata dan belum mencapai rasio ideal. Kebijakan *redistribusi* juga memastikan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah (*age-group population*) berjalan lancar, terdiri a) 0-6 tahun/year 33.517.600, b) 7-12 tahun/year 27.381.500, c) 13-15 tahun/year 13.386.000, d) 16-18 tahun/year 13.281.300, e) 19-23 tahun/year 21.592.800 (Kemendikbud, 2016:2).

Redistribusi guru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, serta beberapa produk hukum turunannya menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap warga adalah tanggungjawab pemerintah. Untuk memastikan layanan itu berjalan optimal, harus dicermati dari rasio guru dengan siswa maupun jumlah minimal guru di masing-masing sekolah yang ada. Hal ini bisa dicermati dari pemenuhan persyaratan penerbitan NUPTK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 yang menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: (1) TK/RA, atau yang sederajat **15:1**; (2) SD atau yang sederajat **20:1**; (3) MI atau yang sederajat **15:1**; (4) SMP atau yang sederajat **20:1**; (5) MTs atau yang sederajat **15:1**; (6) SMA atau yang sederajat **20:1**;

(7) MA atau yang sederajat **15:1**; (8) SMK atau yang sederajat **15:1**; dan (9) MAK atau yang sederajat **12:1**. Sangat jelas bahwa dilihat dari rasio guru dalam satu sekolah dengan jumlah minimal disetiap jenjang pendidikan (1) SD minimal **8 orang**; (2) SMP **10 orang**; (3) SMA **12 orang**; (4) SMK **10 orang**; (5) TK **7 orang** dengan pertimbangan bahwa masing-masing sekolah memiliki murid minimal 100 orang.

Berdasarkan data yang dirilis Kemendikbud RI 2016, posisi guru berjumlah **3.439.794** orang. Sehingga, jika dicari angka rasio guru dan siswa pada setiap jenjang pendidikan, maupun angka minimal guru masing-masingnya, dapat disimpulkan bahwa rasio guru dengan peserta didik disetiap jenjangnya sudah mendekati angka ideal, sebagaimana dirangkum dalam tabel 1

Tabel 1 Rasio Guru dengan Murid dan Sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Siswa	Guru yang ada	Rasio guru dari jmlh sek (min)	Rasio guru dari jmlh siswa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TK	85.499	4.495.432	366.635	598.493	299.695	Rasio guru dari jumlah sekolah <i>belum ideal</i> , dari jumlah siswa <i>sudah ideal</i> ,
	a. Negeri	3.186	309.255	17.655	22.308	20.617	
	b. Swasta	82.313	4.186.177	348.980	576.191	279.078	berarti <i>distribusi</i> diperlukan berdasarkan sekolah.
2	SLB	1.962	114.085	26.859	22.817	22.817	Rasio guru dengan siswa sudah ideal,
	a. Negeri	521	44.473	9.877	8.894	8.894	
	b. Swasta	1.441	69.612	16.982	13.923	13.923	
3.	SD	147.536	25.885.05	1.795.613	1.180.288	1.294.254	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal,
	a. Negeri	132.381	22.795.93	1.592.547	1.059.048	1.139.797	tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	b. Swasta	15.155	3.089.118	203.066	121.240	154.457	
4.	SMP	37.023	10.040.27	681.422	370.230	502.014	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal, tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	a. Negeri	22.475	7.510.978	500.545	224.750	375.548	
	b. Swasta	14.548	2.529.299	180.877	145.480	126.466	
5.	SMA	12.689	4.312.407	295.912	152.268	215.620	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal, tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	a. Negeri	6.355	3.174.888	208.777	76.260	158.745	
	b. Swasta	6.334	1.137.519	87.135	76.008	56.875	

6.	SMK	12.659	4.334.987	273.353	126.590	288.999	Rasio guru dengan sekolah sudah ideal, namun dengan jumlah siswa <i>belum ideal</i> sekaligus <i>belum merata</i> .
	a. Negeri	3.320	1.825.155	127.420	33.200	121.677	
	b. Swasta	9.339	2.509.832	145.933	93.390	167.322	
Jumlah Total		297.368	49.182.2	3.439.794	2.450.686	2.623.399	
a. Negeri		168.238	35.660.68	2.456.821	1.424.460	1.825.278	
b. Swasta		129.130	13.521.55	982.973	1.026.232	798.121	

Analisis dari Ikhtisar Data Pendidikan 2015-2016 oleh Kemendikbud RI, 2016;2.

Tabel 1 di atas, menunjukkan data yang dirilis Kemdikbud 2016, dengan posisi guru 3.439.794, siswa yang dilayani 49.182.241 pada 297.368 sekolah sudah menunjukkan rasio ideal. Analisis

ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (2011) yang sudah merilis hasil monitoring terhadap rasio siswa-guru dinilai sudah membaik, sebagaimana dikutip dalam laporan di bawah ini

Gambar 1 : Rasio Siswa-Guru di Indonesia, 2001-2007



Sumber: Data Balitbang Kemdiknas, 2001-2007.

Catatan: Jika data tahun 2007 Kemag dan Kemdiknas digabung, STR keseluruhan turun jadi 17,7 untuk SD, 12,7 untuk SMP, dan 11,0 untuk SMA.

Dari analisis data terkini pada tahun 2016 dan laporan Bank Dunia 2011 bisa disimpulkan bahwa rasio guru dengan murid dan sekolah rata-rata sudah menuju ke arah yang ideal. Sebagai catatan khusus, rasio guru dan siswa pada level Taman Kanak-Kanak (TK) masih perlu intervensi berupa rekrutmen guru baru.

Rekrutmen Guru oleh “Banyak Pihak”

Fakta objektif lainnya yang menarik untuk ditelisik adalah proses rekrutmen guru. Persoalan

rekrutmen guru menimbulkan berbagai masalah, misalnya menyangkut kebijakan penggajian, standar kualitas pendidik, pengelolaan karir, pendistribusian dan lainnya. Dalam proses rekrutmen guru, ditemukan “keterlibatan banyak pihak”, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Yayasan, Komite sekolah maupun Lembaga donor lainnya, sebagaimana dilihat dalam gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2 : Rekrutmen Guru dan Pihak yang mengangkat



Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>, diakses, 20 September 2016

Banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen guru *menjadikan* persoalan guru di berbagai tingkatan pemerintah sulit diselesaikan. Misalnya soal standar mutu guru yang diterima, kredibilitas proses rekrutmen, pilihan dan tingkat kompetisi serta peluang untuk mendapatkan kandidat terbaik sulit dilaksanakan. Bahkan sepertinya ada indikasi bahwa yayasan, atau lembaga pendidikan menjadi “pintu masuk” seseorang menjadi Aparat Sipil Negara (ASN). Hal

ini tentu membutuhkan (mekanisme) kontrol yang ketat, sehingga ke depannya tidak menjadi masalah bagi pemerintah terkait dengan pengembangan karir, kesejahteraan, hak dan kewajiban sebagai pendidik. Karena urusan gaji guru dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan konsekuensi bagi pengeluaran negara yang semakin besar (meningkat dua kali lipat), seperti dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini

Tabel 2 Jenis Guru untuk seluruh jenjang sekolah dan pengajiannya serta ciri khusus

Jenis guru	Diangkat oleh	Digaji oleh	Ciri-ciri khusus
Guru pegawai negeri sipil			
- Sekolah negeri	Kab/kota	Pusat (DAU)	• Kuota pengangkatan ditetapkan pusat, tapi pemilihan oleh daerah
- Sekolah swasta	Kab/kota	Pusat (DAU)	• Pemerintah menugaskan sejumlah kecil guru pegawai negeri sipil ke sekolah swasta
Guru kontrak			
- Diangkat pusat	Pusat	Pusat (DAU)	• Akan diangkat jadi pegawai negeri sipil sebelum akhir 2009
- Diangkat daerah	Kab/kota	Kab/kota	• Gaji pada umumnya separuh dari guru pegawai negeri sipil
Guru yang diangkat sekolah			
- Sekolah negeri	Sekolah	Sekolah, Pusat (DAU)	• Sering diberi honor kecil (10–30% dari gaji pegawai negeri sipil)
- Sekolah swasta	Sekolah	Sekolah, Pusat (DAU)	• Guru yang diangkat sekolah kini menerima tunjangan fungsional dan profesional dari pemerintah pusat • Dana BOS telah meningkatkan jumlah guru yang diangkat langsung oleh sekolah

Sumber: Disusun oleh Bank Dunia, 2009.

Penggajian guru diproyeksi akan semakin memberatkan keuangan negara seiring dengan masuknya gelombang guru baru, dan semakin bertambahnya guru dalam jabatan yang tersertifikasi. Meski hal ini menjadi Amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tapi tak bisa diabaikan bahwa UU No.14/2005 juga memberikan amanat peningkatkan mutu tenaga kependidikan melalui pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme guru. Sasaran-sasaran tersebut diharapkan bisa tercapai melalui penyediaan tunjangan profesional dan perlakuan tersendiri bagi daerah khusus. Semua ini bertujuan mendorong guru agar meningkatkan kualifikasi mereka dan agar lebih tertarik mengajar di daerah-daerah terpencil sehingga mampu mendistribusikan guru secara merata, khususnya untuk daerah-daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

KEBIJAKAN YANG BERSIFAT RESPONSIF DAN SOLUTIF

Adapun langkah inisiatif yang perlu dilakukan terhadap sistem pengangkatan dan pendistribusian guru adalah reformasi tata kelola guru, dimulai dari redistribusi dan rekrutmen guru. Selama ini kebijakan tata kelola guru selalu diawali dengan rekrutmen guru yang berjalan “longgar” kemudian terus didistribusikan. Akibatnya, siapa saja bisa menjadi guru tanpa ada seleksi kompetensi yang “ketat”. Ujungnya, pemerintah kesulitan dalam penggajian, pembinaan dan pengawasannya (Baswedan, 2015). Untuk mengatasi persoalan redistribusi dan rekrutmen guru baru secara berkualitas, Indonesia membutuhkan kebijakan yang bersifat responsif dan solutif dalam konteks tata kelola guru (*teacher management*). Kebijakan itu oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI disebut “*quick win*” berupa redistribusi guru dan rekrutmen guru berkarya merupakan langkah baik yang mesti didukung.

Keberanian melakukan Redistribusi Guru (Beberapa Model Alternatif)

Untuk suksesnya kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan ada beberapa hal yang mesti

diperhatikan, antara lain:(1) pendekatan lingkungan (*environment*); (2) pendistribusian informasi; dan (3) *sociaproofing*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat “Quick Win” terkait dengan kebijakan rekrutmen dan pendistribusian guru berbentuk “*key leverage*” dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek utama. Dengan begitu, publik akan langsung merasakan bagaimana kekurangan guru di sekolahnya bisa diatasi sementara di sekolah lainnya terjadi kelebihan guru. Di sekolah tertentu banyak guru yang sulit memenuhi ketentuan mendapatkan jam mengajar yang sesuai dengan beban kerjanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sebaliknya di berbagai daerah pedesaan, lebih ironinya di daerah terluar, terdepan dan terpencil pemerintah kesulitan mendistribusikan guru. Karena berbagai pertimbangan yang menyebabkan calon guru maupun guru yang sudah ada ingin bermigrasi ke daerah perkotaan.

Selama ini pemerintah mencoba memenuhi kebutuhan guru dengan melakukan program pengangkatan guru baru mesti dirubah dengan paradigma redistribusi guru dengan menghitung beban kerja sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 17 Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa “beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah”. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah diminta untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang kuat melakukan redistribusi guru. Kebijakan redistribusi guru harus segera diambil. Tanpa kebijakan yang komprehensif, kita akan sulit mencapai posisi ideal dengan komposisi siswa dan kondisi geografis sekolah yang berada pada lokasi berjauhan. Sekaligus potensi guru bermigrasi ke perkotaan semakin menggoda seiring masih terjadinya disparitas fasilitas kehidupan antara pedesaan dan perkotaan.

Saya yakin kebijakan redistribusi guru bisa berhasil, kalau pemerintah melakukan intervensi dengan menanamkan *mentalitas pemenang* yang menjadi bagian dari kebijakan *quick win* bagi guru di tengah-tengah semangat berkompetisi yang tinggi. Program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa menjadi pemantik guru-guru

yang berusia produktif-bersemangat mengikuti program mengajar di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil) sebelum menduduki jabatan strategis baik di sekolah maupun pada unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator keberhasilan *Quick Win* dalam redistribusi guru ditandai dengan perubahan *mindset* guru dengan semangat ikhlas dan gembira mengikuti kebijakan redistribusi dengan berbagai kompensasi yang mesti dipikirkan pemerintah, di antaranya menyangkut biaya hidup, biaya migrasi, dan kompensasi tunjangan lainnya sekaligus promosi karir. Kebijakan seperti ini memberikan semangat dan harapan baik bagi setiap guru yang ingin karirnya ke depan lebih baik dengan persyaratan siap mengikuti program redistribusi antar daerah atau antar provinsi yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan mendapatkan pertimbangan dan insentif dari pemerintah daerah.

Untuk keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama melakukan redistribusi guru di seluruh Indonesia. Langkah *pertama* yang harus dilakukan adalah membuat pendataan guna memastikan kelebihan dan kekurangan guru di tiap wilayah; *kedua*, sesuai kewenangan yang dimiliki, Pemda berhak memindahkan guru berdasarkan kebutuhan di setiap area sesuai jenjang pengabdian dan mata pelajaran yang diampu. Proses redistribusi guru bisa dilakukan dengan berbagai model, antara lain: 1) *model multigrade teaching* atau model pengelolaan kelas rangkap (PKR) bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru; 2) model Graf per mata pelajaran dengan Algoritma Dijkstra, 3) model sistem pendukung redistribusi dan rekrutmen guru berbasis aplikasi yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM) guru; 3) model redistribusi guru melalui *participatory management*

1. Model Multigrade Teaching atau Model Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)

Redistribusi guru bisa menggunakan model *Multigrade teaching* (MGT) atau sering juga dikenal dengan menghitung jumlah kebutuhan

guru menggunakan program pembelajaran kelas rangkap (PKR). Model ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan model ini dilakukan karena faktor pendistribusian tenaga guru yang belum merata, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran guru. Penggunaan model *multigrade teaching* sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan sekolah, dengan persyaratan guru sudah diberikan pelatihan dan kreativitasnya mengelola pembelajaran kelas rangkap sudah teruji (Hendikawati, 2008: 61). Disamping itu model PKR ini cocok juga digunakan untuk Sekolah Dasar yang mengalami kekurangan guru di daerah perbatasan atau terpencil (Maasawet, 2015:1-7)

Model *Multi Grade Teaching* ini harus dipahami sebagai sebuah program transisi, karena mengajar lebih dari dua kelas akibat kekurangan guru tentu akan memperburuk disparitas mutu antara sekolah yang kelebihan guru dengan sekolah yang kekurangan guru, sembari pemerintah menyiapkan kebijakan dengan model distribusi guru lainnya.

2. Model Graf per Mata Pelajaran dengan pendekatan Algoritma Dijkstra

Model Graf menjadi salah satu model redistribusi guru menggunakan pendekatan Algoritma Dijkstra yang bertujuan mencari path terpendek antara dua titik sekolah (Jong Jek, 2006). Model ini adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu untuk diinterpretasikan secara tepat mendistribusikan kembali atau memutasi guru. Adapun dokumen yang diperlukan berupa data tentang sekolah-sekolah mana yang kelebihan dan sekolah-sekolah mana yang kekurangan guru, dalam hal ini data dari NUPTK diolah yang kemudian menjadi data sekolah yang kelebihan guru dan sekolah yang kekurangan guru. Model Graf mampu menggambarkan alur pendistribusian ulang guru (redistribusi) secara tepat, berdasarkan parameter: status kepegawaian, jenis kelamin, masa kerja, golongan dan jarak. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra dapat diketahui adanya *path* terpendek dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru.

3. Model *Participatory Management*

Model redistribusi guru melalui *participatory management* dapat dipahami sebagai pemberdayaan guru untuk ikut serta mengambil keputusan berkaitan dengan upaya mengatasi masalah pendistribusian guru di berbagai sekolah. Dalam konteks budaya birokrasi yang sudah mapan faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan manajemen partisipasi ini yaitu ketentuan beban kerja 24 jam tatap muka bagi PNS dan pemberian tunjangan bagi guru di daerah terpencil sebagaimana menjadi amanat Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 memberikan penguatan kegiatan pokok guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu mendorong guru bersedia ditempatkan di berbagai daerah. Sekaligus pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil dapat juga mengatasi masalah kekurangan guru diberbagai sekolah tertentu (Yani, 2010: 47).

Ada beberapa faktor pra-kondisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan model redistribusi guru melalui *Participatory Management*, antara lain, (1) payung hukum kebijakan; (2) basis data dan informasi kependidikan; dan (3) penyediaan dana tunjangan. Payung hukum terkait dengan mekanisme atau aturan main ini bagi guru yang akan memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka, bisa diperbolehkan dengan mengajar di sekolah lain melalui status guru kunjung (*visiting teacher*).

Model ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah, misalnya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Dalam melaksanakan *visiting teacher*, guru dibekali dengan kelengkapan administrasi yang baku dan dengan pembekalan (kompetensi guru) yang memadai. Artinya, tidak hanya berkunjung ke sekolah yang kekurangan guru tetapi mereka wajib “membawa” inovasi pembelajaran hasil pelatihan *visiting teacher*. Selanjutnya, ia juga harus membawa data dan sistem informasi distribusi guru. Data ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena tanpa data, para pengelola akan

sulit menjalankan kebijakan. Penyediaan dana tunjangan, bisa bersifat instan dan atau bersifat bersaing. Tujuannya untuk semua guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil atau melaksanakan tugas pelayanan di sekolah yang kekurangan guru (baik guru kelas di SD-MI maupun guru bidang studi di SMP-MTs) bisa diberikan tunjangan yang bersifat bersaing merupakan tunjangan yang diperlombakan. Tunjangan bersaing sangat cocok bagi guru yang melakukan inovasi pembelajaran dan menjadi *agent of change* bagi sekolah yang dikunjunginya. Kegiatan guru yang menjadi *agent of change* misalnya dapat memberi wawasan tentang pengembangan dan inovasi pembelajaran lainnya.

4. Model Sistem Informasi Manajemen (SIM) Guru

Sistem pendukung redistribusi maupun pengadaan guru sudah saatnya berbasis aplikasi yang menggunakan model Sistem Informasi Manajemen (SIM) guru yang sudah dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menentukan kekurangan dan/atau kelebihan dan pendistribusian guru pada setiap sekolah berdasarkan jumlah yang ada. Sistem ini hendaknya memuat sub sistem basis data, dan subsistem antar muka pengguna, guna menentukan rasio siswa- guru, siswa-rombongan belajar, dan guru-rombongan belajar.

SIM Guru menyediakan data yang menampilkan informasi penting mengenai guru, sekolah dan siswa. Selain itu SIM Guru menyediakan informasi tentang penduduk usia pra sekolah, usia sekolah untuk tiap-tiap kecamatan. Basis data antar muka pemakai terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, hak akses pemakai terhadap sistem sesuai dengan tipenya masing-masing yang diatur oleh administrator sistem. Dengan kemampuan SIM Guru, maka pembuat keputusan pada level nasional dan memperoleh support data/informasi dari pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sehingga akan terbantu dalam pengadaan dan pendistribusian guru. Dengan sistem ini juga akan mempermudah pemerintah di setiap tingkatan dalam melakukan proses update data, karena setiap saat kebutuhan

data bisa tersedia secara cepat, tepat dan akurat (Sembiring, 2004).

Rekrutmen Guru secara Nasional

Analisis rasio guru dengan siswa sebagaimana dalam tabel 1 di atas juga dikuatkan dengan data SIM guru yang dirilis Harian Nasional (15 Maret 2016) yang mengungkapkan bahwa hampir tiap wilayah di Indonesia mengalami kelebihan guru. Data SIM Guru mencatat ada kelebihan 159.322 guru untuk jenjang SD dan 381.726 tenaga pendidik untuk tingkat SMP. Di tingkat SD ada 1.17.356 guru padahal pendidik yang dibutuhkan hanya 1.008.034. Di SMP ada 1.393.272 guru meski kebutuhannya hanya 1.011.546 tenaga pendidik. Data SIM guru dalam melakukan analisis kebutuhan guru menggunakan dasar penghitungan didasari atas Rasio Guru Siswa (RGS) 1:24 dengan 24 jam mengajar dalam seminggu bagi setiap guru. Data SIM Guru mensuplai data beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kelebihan guru, namun terdeteksi juga daerah yang mengalami kekurangan guru yakni di Provinsi Papua. Untuk guru SD, dibutuhkan 8.023 guru, yang tersedia hanya 7.153. Sebanyak 2.043 berstatus PNS lulusan S1, 3.066 PNS non S1, dan 130 honorer S1. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru diberbagai daerah, disamping membutuhkan kebijakan pemerintah untuk redistribusi juga dibutuhkan rekrutmen guru baru. Karena tiap tahun guru di Indonesia memasuki usia pensiun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3 dibawah ini

Tabel 3 Proyeksi Guru Memasuki Pensiun

Tahun 2016	39,064
Tahun 2017	46,867
Tahun 2018	64,773
Tahun 2019	77,535
Tahun 2020	88,296
Jumlah Keseluruhan	316,535

Sumber :

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/> Gambar 3 : Proyeksi Pensiunan GTK

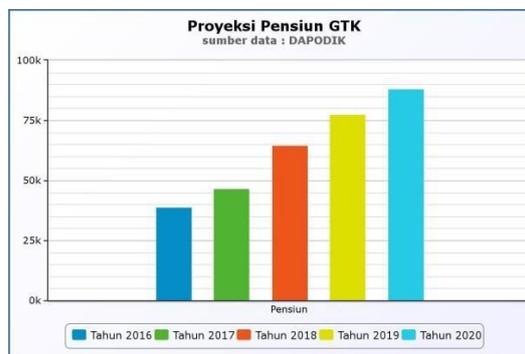
Kebijakan pengangkatan guru sudah semestinya dilakukan secara nasional dalam rangka menjaga nilai-nilai persatuan nasional dan penguatan

wawasan kebangsaan yang inklusif (*bhinneka tunggal ika*). Karena guru menjadi salah satu instrumen (input utama) dalam proses pendidikan kebangsaan. Guru juga menjadi “jantung”nya pendidikan Indonesia. Melihat pentingnya peranan guru dalam proses pendidikan dan kaitan antara pendidikan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, nampaknya perlu menempatkan pengambilan kebijakan pengangkatan guru dalam posisi yang ruang lingkupnya secara nasional.

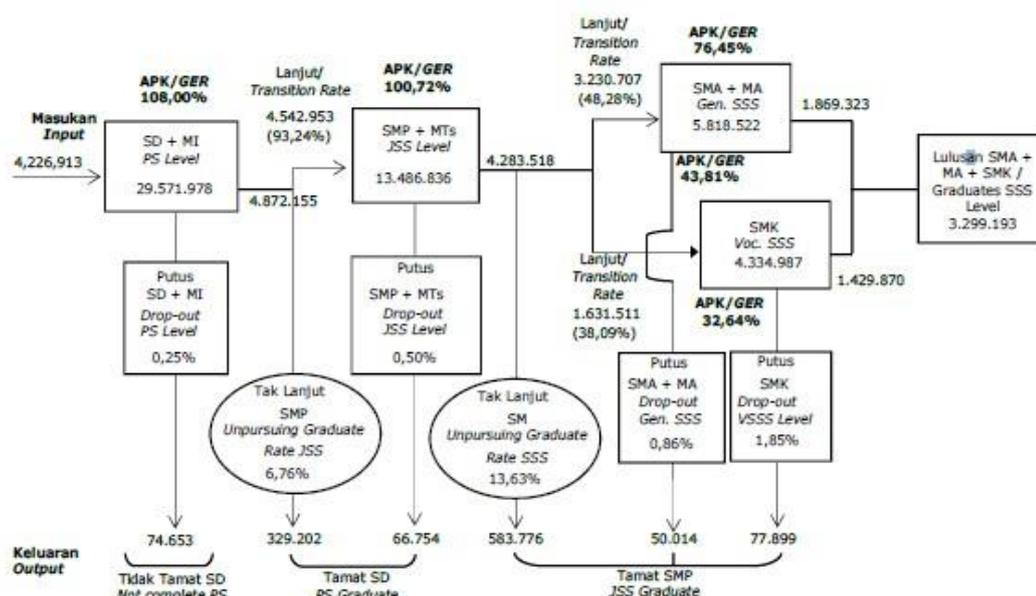
Tata kelola manajemen guru sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan menimbang potensi, aspirasi dan “kebutuhan spesifik” pada setiap wilayah di Indonesia. Posisi ini diperkirakan jauh lebih tepat dibandingkan dengan posisi yang didominasi oleh pemerintah daerah. Ada beberapa alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan: a) kebijakan pengadaan

(pendidikan prajabatan) guru berada di satu tangan dengan kebijakan pengangkatan, sehingga prinsip *supply-demand approach* dapat diterapkan; b) kebijakan pemerataan pemenuhan kebutuhan guru menurut daerah dapat dilaksanakan sehingga menghindarkan adanya ketimpangan dalam jumlah guru antara satu daerah dengan daerah lain; c) kebijakan pengangkatan guru secara terbuka dapat terlaksana sepenuhnya, artinya bahwa penerimaan/pengangkatan seseorang guru di suatu daerah tanpa secara (mutlak) memperhatikan daerah asal atau latar etnik calon guru (Simbolon, 2001).

Agar diskresi pengangkatan guru lebih bermakna dan mendapatkan pilihan yang kredibel, maka proses secara nasional dengan menganalisis kebutuhan guru baru masing-masing daerah



maupun kebutuhan pindahan guru melalui analisis kohor arus jumlah siswa setiap tahunnya dalam tempo waktu yang panjang, seperti dijelaskan pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 : Arus Siswa SD, SMP, SMA, MA dan SMK menggunakan Analisis Kohort 2016/2017

Dengan analisis kohor di atas, pemerintah daerah akan mengetahui 1) populasi siswa di tiap kabupaten/kota; dan 2) jumlah guru yang mutasi, meninggal, maupun yang diberikan tanggungjawab tambahan lainnya dalam jabatan tertentu. Begitu juga analisis kohor membantu Pemerintah Kabupaten/Kota berkesempatan menyampaikan *kebutuhan guru* setiap tahunnya, sambil memperhatikan daerah asal guru-guru, dengan tujuan agar tidak ada keinginan/pelebaran dari guru untuk mutasi dalam jangka pendek (World Bank, 2011). Pengangkatan Guru Honorer harus selektif melalui sistem seleksi Nasional

Kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menyisakan masalah pelik ditengah rasio guru dan siswa serta sekolah mendekati ideal. Memang realitasnya dari 3,4 juta guru yang ada dalam laporan Kemdikbud RI, belum semua berstatus PNS dan tentu saja mereka yang sudah lama mengabdikan dan memenuhi standar penerimaan PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bisa diproses untuk ditingkatkan statusnya menjadi PNS. Hal ini guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Persoalannya tidak semua guru honorer itu layak diangkat menjadi PNS, seleksi penerimaannya juga harus melalui proses yang

diberlakukan secara nasional agar memenuhi standar kepegawaian secara nasional (Sahabat, 2013).

Rekrutmen Guru Melalui Program SM3T Perlu Diteruskan

Kebijakan pemerintah yang strategis sudah tertuang dalam program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI berupa rekrutmen guru melalui program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Berdasarkan pengalaman dan survey yang dilakukan pada masing-masing penyelenggara program SM3T, memberikan indikasi bahwa program SM3T perlu dilanjutkan. Program ini mampu untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah di Jawa dan wilayah luar Jawa. Tahun 2016, peminat guru PNS wajib mengikuti serta pendidikan asrama dahulu sebelum mengikuti program SM3T. Dengan model SM3T, menjadikan calon guru yang akan berstatus pegawai negeri sipil alias PNS mirip dengan menjadi dokter karena sama-sama harus mengabdikan di daerah terluar, terdepan dan terpencil lebih dahulu. Seperti kita ketahui, bahwa untuk menjadi dokter PNS, calon dokter harus mengikuti program pegawai tidak

tetap (PTT) di daerah terpencil. Hal yang sama seharusnya bisa berlalu bagi calon-calon guru PNS.

Program SM3T sebetulnya bukan program baru sudah dimulai sejak tahun 2011 dipelopori Mendikbud Mohammad Nuh sudah menerjunkan 2.400 calon guru PNS ke berbagai pelosok negeri. Kini SM3T telah memasuki angkatan kelima, proses seleksinya dilaksanakan pada 21 lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Mereka diterjunkan dan mengabdikan di wilayah terpencil selama setahun. Setelah itu kembali ke LPTK, mengikuti PPG berasrama selama dua semester. Selama mengabdikan di daerah 3T dan menjalankan PPG, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah menetapkan sembilan provinsi yang menjadi tempat penempatan SM3T, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku. Karena kabupaten-kabupaten di provinsi itu pasti jauh dari kota. Setelah menyelesaikan program ini, kemudian dilanjutkan Program Pendidikan Guru (PPG), dimana mahasiswa menempuh pendidikan di asrama. Semua perguruan tinggi yang tergabung dalam ALPTKI ini adalah sebagai penyelenggara.

SM3T merupakan sistem rekrutmen guru, mampu memberikan pemetaan kebutuhan guru baru secara nasional. Sekaligus mampu menghadirkan guru-guru pejuang tangguh, siap mengabdikan di mana saja, karakter nasionalnya terbangun, siap mengabdikan dengan ikhlas dan hidup penuh kesederhanaan. Peserta SM3T terbukti juga mampu mempunyai kekayaan "aspirasi" untuk kemajuan Indonesia. Karakter baik yang didapatkan mereka (dari lapangan) menjadi nilai tambah ditengah-tengah kompetisi rekrutmen guru yang semakin ketat. Hasil survey PPG dan SM3T perlu menjadi catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dimana peserta PPG dan SM3T, keinginan untuk kembali dan membangun daerah asal 3T menunjukkan hasil bahwa 21% tidak ingin kembali ke daerah 3T, sebanyak 36% menyatakan ingin kembali ke daerah 3T dengan syarat ada jaminan menjadi PNS dan dapat mengajukan pulang kembali ke tempat kelahirannya setelah 3-5 tahun berada di daerah 3T. Sedangkan 43% belum memiliki sikap (belum tahu) ke depannya (Ridho,

2015:7). Peserta SM3T dari sisi perjuangan dan daya tahannya (*adversity question*) dalam menghadapi berbagai kesulitan sudah teruji.

PENUTUP

1. Berbagai data dan fakta menunjukkan bahwa rasio guru dan siswa sudah menunjukkan posisi ideal, di beberapa daerah terjadi kelebihan guru dan di daerah lainnya ada yang mengalami kekurangan guru. Untuk itu kebijakan pemerintah, perlu melakukan redistribusi guru, sekaligus rekrutmen guru untuk memberikan kepastian pengangkatan guru honorer dan kesempatan peserta didik baru dari lulusan LPTK untuk mengabdikan menjadi guru;
2. Agar rekrutmen guru berjalan baik, maka perlu dilakukan, antara lain: (a) menyesuaikan formula penentuan jumlah guru di sekolah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan di sekolah-sekolah berukuran kecil; (b) memperkenalkan pola pengajaran kelas rangkap di sekolah dasar berukuran kecil terutama yang berlokasi di wilayah yang sulit dijangkau; (c) menyusun suatu sistem yang memungkinkan guru memperoleh sertifikasi untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran (Mapel) dan mendorong guru untuk mengajar Mapel ganda terutama di sekolah-sekolah menengah berukuran kecil; dan (d) menerapkan ketentuan beban mengajar minimum 24 jam per minggu;
3. Dalam jangka panjang, proses rekrutmen guru bukan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan nasional melainkan juga berorientasi merebut pasar kerja internasional yang semakin terbuka di berbagai negara berkembang, terutama di kawasan ASEAN;
4. Pendistribusian guru harus dilakukan dengan konsep *quick win* yang berorientasi pada berbagai program fundamental yang bisa dirasakan manfaat dan iklim perubahannya ke arah yang lebih baik, dengan kepekaan tertentu dalam mengambil keputusan di tingkat nasional dan di daerah, melalui sistem informasi/data guru yang lebih komprehensif;
5. Manajemen tata kelola guru harus dilakukan menggunakan berbagai model redistribusi, maupun sistem rekrutmen secara nasional sehingga standar proses seleksi bisa dikontrol, penggajian dan pengembangan karir dilakukan secara profesional;
6. Program SM3T masih perlu dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harian Nasional, (2016), *Redistribusi Guru Mendesak*, <http://www.harnas.co/2016/03/15/redistribusi-guru-mendesak>, diakses 2 Oktober 2016.
- Hendikawati, P. (2008). "Multigrade Teaching: Upaya Mengatasi Masalah Pendistribusian Guru yang tidak Merata di Indonesia". *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 37(1).
- Jannah, S. K. (2014). *Sistem Keputusan Pendistribusian Perangkat ICT dengan Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) dan Topsis, Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kemendikbud RI, (2016). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015-2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI.
- Maasawet, E. T. (2015). "Model Pengelolaan Kelas Rangkap (PKR) untuk Sekolah Dasar yang Mengalami Kekurangan Guru di Daerah Perbatasan atau Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur". *Bioedukasi*, 8(1), 1-7
- Ridlo, S. (2015). "Pengembangan Karakter Konservasi untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (PPG-SM3T)". *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 43(2), 94-102.
- Sahabat, I. G. (2013). "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan (Suatu Studi di Kabupaten Sangihe)". *Governance*, 5(1).
- Santoso, D. A., Purnama, I. K. E., & Sumpeno, S. (2013). "Optimasi Distribusi Guru Berbasis Metode Dijkstra". *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 2 Februari 2013, hal c-9-1 s/d c-9-7*
- Sembiring, D. J. M., & Wardoyo, R. (2004). *Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan dan Pendistribusian Guru Sekolah Dasar Berbasis WEB*. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siang, Jong Jek. (2006), *Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer*. Edisi ke-3, Andi Offset. Yogyakarta.
- Simbolon, O. (2001). "Otonomi Daerah dan Pendidikan". *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No. 2/XX/2001, Universitas Negeri Jakarta.
- Siregar, T (2006). *Analisis dan Pengembangan Pola Distribusi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Deli Serdang*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- World Bank (2011). *Mentransformasi Tenaga Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kantor Bank Dunia Perwakilan Indonesia.
- Yani, A. (2010). "Kebijakan Distribusi Guru melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah". *Manajerial*, Volume 9 (17): 47-54.



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia
KONASPI VIII
2016

**Kantor Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
Universitas Negeri Jakarta**

Gedung Rektorat UNJ Lantai 3
Kampus A Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telp. 021-47860238 / Fax. 021-4895130

Email: konaspi@unj.ac.id

Website: www.seminars.unj.ac.id/konaspi

ISBN 978-602-60240-0-8

